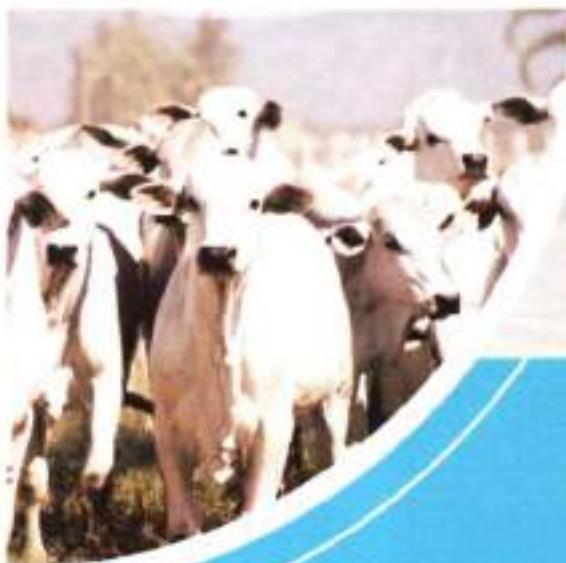
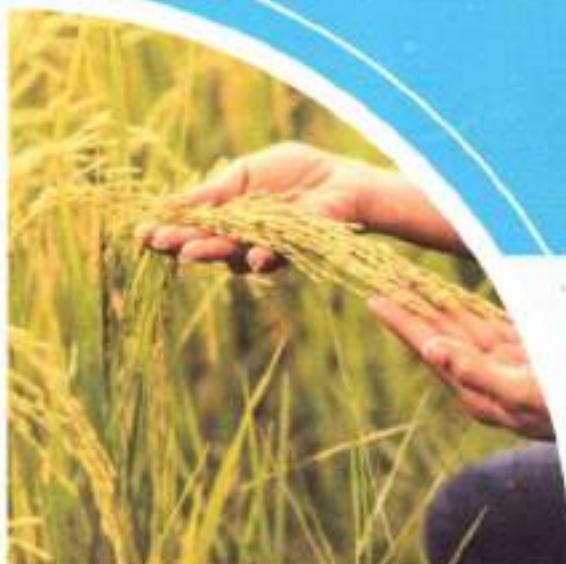




RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Kemajuan perkembangan pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi semakin lama semakin berkembang, sehingga perlu upaya pemerintah untuk menjawab tuntutan tersebut dengan memberikan fasilitas pelayanan yang seiring dengan keinginan Masyarakat dan stakeholder yang sejalan dengan perkembangan kemajuan arah Pembangunan sesuai dengan landasan hukum.

Peran pemerintah daerah dalam mengakomodasi hal tersebut salah satunya dengan menjalankan program serta kegiatan yang digunakan pemerintah dalam pelayanan dan inovasi yang sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan sebagai acuan setiap Perangkat Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan mengacu dan bersinergi dengan tujuan Pembangunan daerah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis Peralihan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota madiun Tahun 2025 - 2026 dapat terselesaikan. Dengan adanya dokumen Rencana Strategis Peralihan ini diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tujuan, sasaran, kebijakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, yang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis Peralihan Tahun 2025-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang. Semoga Dokumen Rencana Strategis Peralihan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III.....	61
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	61
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	61
3.2. Isu Strategis.....	64
BAB IV.....	65
TUJUAN DAN SASARAN	65
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026.....	65
4.2 Cascading Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	67
BAB V.....	68
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	68
BAB VI.....	70
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	70
BAB VII.....	83
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	83
BAB VIII.....	87
PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	21
Tabel 2. 2 Aset Pendukung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	22
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 2020 – 2023	23
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2023.....	47
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	61
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun	65
Tabel 4. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung Sasaran RPD	66
Tabel 4. 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.....	66
Tabel 5. 1 Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	68
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.....	71
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ...	83
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ...	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	21
Gambar 4. 1 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap 5 (lima) tahun sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra PD tidak lepas dari peran stakeholder serta Masyarakat. Tahapan penyusunan Renstra PD tertuang dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimulai dari tahapan :

- a. persiapan penyusunan renstra.
 - Menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
- b. penyusunan rancangan awal renstra Perangkat Daerah.
 - Dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD/RPD, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan
 - b. analisis permasalahan
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya
 - d. analisis isu strategis
 - e. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan RPJMD/RPD
 - f. merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah
 - g. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah

- c. penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
 - Untuk penyempurnaan menunggu Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan awal RPJMD/RPD
 - Rancangan awal Renstra untuk menjadi rancangan Renstra harus disempurnakan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Renstra Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam berita acara
 - Penyampaian rancangan Renstra paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum perangkat daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Bappeda.
 - Verifikasi rancangan renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian perangkat daerah kepada Bappeda.
- d. pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
 - dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir, dan
- f. penetapan
 - ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengelola urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang telah dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang disusun telah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026-2026. Renstra PD merupakan potret dari Rencana strategis dari masing-masing Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun yang telah disusun melalui berbagai tahapan dan telah melibatkan unsur masyarakat dan stakeholder, Renstra PD yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas dan pokok dan fungsi serta

kewenangan Perangkat Daerah. Renstra PD akan menjadi dasar acuan penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/Lembaga terkait:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteeri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
36. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada renstra tahun sebelumnya yaitu Renstra tahun 2019-2024;
2. Memberikan gambaran rencana strategis Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2026;
3. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah

1. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai dasar Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dan Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai berikut :

Penetapan Renstra Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

 1.1. Latar Belakang

 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

 1.3. Maksud dan Tujuan

 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

 2.4. Kelompok Sasaran

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026
- 4.2. Cascading Kinerja PD
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 7.2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD
- BAB VIII : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 38 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.

Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun adalah “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan Kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan ;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan ;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan ;
- d. Pelaksanaan Pembina UPTD ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Dengan Rincian Tugas :

1. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan ;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan UPTD ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

2. Sekretariat

Mempunyai Tugas :

- a. Penyusun rumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;
- g. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari atas 1 Sub Bagian dan 1 Sub Koordinator sebagai berikut :

2.1 Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai Fungsi :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. melakukan urusan surat-menurat dan tata kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;

- d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan;
- g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
- h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- i. menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;
- j. menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian

Mempunyai Fungsi :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang Ketahanan Pangan. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas urusan Ketahanan Pangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan diversifikasi ketahanan pangan;
- d. Penanganan Kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- e. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Ketahanan Pangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) Sub Koordinator sebagai berikut :

3.1 Sub Koordinator Ketersediaan Dan Pengelolaan Kemandirian Pangan Mempunyai

Mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Ketersediaan dan Pengelolaan Kemandirian Pangan;
- b. Melaksanakan pengkajian, identifikasi, survei dan rencana kebutuhan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka rencana penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- d. Melaksanakan penyediaan infrastruktur lumbung pangan, lantai jemur, infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;

- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik;
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pengelolaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengelolaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- h. Melaksanakan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- i. Melakukan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- j. Melaksanakan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan;
- m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
- n. Melaksanakan pengadaan cadangan pangan;
- o. Melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Melaksanakan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita Per Tahun;
- c. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- d. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;
- e. Melaksanakan Tugas lain yang bersifat Kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

3.3 Sub Koordinator Keamanan dan Kerawanan Pangan

Mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan ;
- b. Melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan;
- d. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- e. Melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar;
- f. Melaksanakan Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. Melaksanakan Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- h. Memberikan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan ;
- i. Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

4. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang Pertanian. Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pertanian;
- b. pelaksanaan budidaya, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan penyuluhan pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pertanian terdiri dari 3 (tiga) Sub Koordinator sebagai berikut :

4.1 Sub Koordinator Budidaya, Prasarana dan Sarana Pertanian

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Budidaya, Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Melakukan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi,
- c. Melakukan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian ;
- d. Melakukan pendampingan proses budidaya pertanian menuju sertifikasi produk pertanian;
- e. Melakukan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B , kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B;
- f. Melakukan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B;
- g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya ;
- h. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani ;
- i. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani ;
- j. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit ;
- k. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air ;
- l. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya ;
- m. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.

4.2 Sub Koordinator Penyuluhan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Penyuluhan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- b. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa/kelurahan ;
- c. Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa/kelurahan ;
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian ;
- e. Melakukan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian ;
- f. Melakukan pembentukan badan usaha milik petani ;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- h. Melakukan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. Melakukan pembinaan dan pendampingan penyediaan sarana perlindungan tanaman alami (non kimia),
- j. Melakukan pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana perlindungan tanaman alami untuk peningkatan kualitas produksi tanaman;
- k. Melakukan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan ;
- l. Melakukan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- m. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.

4.3 Sub Koordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. Melakukan Pelayanan Kesehatan Hewan yang meliputi tindakan, pencegahan, vaksinasi, pengobatan penyakit dan monitoring atas kasus penyakit pada ternak besar, ternak kecil dan unggas;
- c. Melakukan pencegahan penyakit hewan menular dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota serta penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
- d. Melakukan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (puskeswan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan), pengamatan, pemetaan, pencatatan, pelaporan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan serta pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
- e. Melakukan pemrosesan pemberian rekomendasi izin usaha praktir dokter hewan mandiri, praktik dokter hewan bersama dan klinik hewan sesuai peraturan daerah yang berlaku;
- f. Melakukan pengawasan terhadap peredaran obat hewan di toko penjualan obat/poultry shop/petshop/tempat praktik hewan
- g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas peredaran bahan produk asal hewan (daging sapi, daging ayam, susu dan telur);
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan praktir hygiene sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan Produk Asal Hewan serta monitoring penerapan persyaratan hygiene, sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
- i. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengawasan penerapan standar mutu, pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, pengujian alat/mesin peternakan dan keshatan hewan (keswan) serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet);
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi pakan, bahan baku pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak, standar mutu pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak;
- k. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan, peredaran, pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pengganti (additive dan suplemen) ;

- l. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta bimbingan di bidang peternakan ;
- m. Melakukan Penyusunan data populasi ternak dan informasi pasar ;
- n. melakukan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak ;
- o. melakukan penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan hama penyakit tumbuhan, bahan pakan, pakan ;
- p. melakukan pengujian mutu benih dan bibit ternak ;
- q. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak ;
- r. melakukan penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan ;
- s. melakukan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak ;
- t. melakukan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hama penyakit tumbuhan, bahan pakan/pakan ;
- u. melakukan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain ;
- v. melakukan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain ;
- w. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang Perikanan. Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perikanan;
- b. pelaksanaan budidaya, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan;
- e. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- g. pengawasan kesehatan lingkungan perikanan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan terdiri dari 2 (Dua) Sub Koordinator sebagai berikut :

5.1 Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Mempunyai Fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- b. menyusun rencana kegiatan Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Sub Koordinator Budidaya Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi perbenihan, budidaya dan sarana prasarana perikanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan baku;
- f. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya dan perairan umum, serta sarana prasarana perikanan;
- g. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka pelestarian potensi sumber daya perairan umum daratan;
- h. melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan mitigasi bencana alam sumber daya ikan beserta ekosistemnya;
- i. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan serta sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran terhadap perundang-undangan perikanan;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kelompok pembudidaya, kelompok masyarakat pengawas dan perairan umum dan sarana prasarana perikanan yang diperlukan;

- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi usaha perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya dan sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan yang diperlukan;
- o. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidaya Ikan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan;
- q. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ekspor/impor induk dan benih ikan;
- r. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Sub Koordinator pengelolaan sumber daya ikan;
- s. melakukan penyiapan bahan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator budidaya perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.2 Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Mempunyai fungsi :

- a. menyusunan program kerja pada Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengolahan produk perikanan dan pemasraannya;
- c. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d. mengelola data pengolahan dan pemasaran;
- e. memberikan rekomendasi perizinan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. memfasilitasi pemasaran dan penyelenggaran promosi kelautan dan perikanan;

- g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penerapan manajemen mutu terpadu atau hazard analysis critical control di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembangunan dan pengelolaan pasar ikan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Koordinator pengolahan pemasaran;
- j. melaksanakan penyuluhan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. UPTD

UPTD mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- b. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki sumber daya manusia yang bertugas dalam pengembangan organisasi dengan rincian personil sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Jabatan	Status Kepegawaian				Pendidikan Terakhir				
		PNS	PPPK	Kontrak	Upah	SD/SMP	SMA	D1/D3	D4/S1	S2/S3
1	Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Pejabat Eselon III	4	-	-	-	-	-	-	3	1
3	Pejabat Eselon IV	1	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Pejabat Sub Koordinator	8	-	-	-	-	-	-	7	1
5	Fungsional Umum (JFU)	6	-	-	-	-	2	1	3	-
6	Fungsional Tertentu (JFT)	6	-	-	-	-	-	4	2	-
7	Pelaksana	42	-	5	37	2	31	-	9	-

Selain sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga memiliki aset yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi yaitu:

Tabel 2. 2 Aset Pendukung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Barang	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
	TANAH	2	
1	Tanah	2	
	PERALATAN	2.983	
2	Alat-alat Besar	41	
3	Alat-alat Angkut	41	
4	Alat-alat Bengkel	168	
5	Alat-alat Pertanian	218	
6	Alat Kantor dan RT	980	
7	Alat Studio dan Kom	36	
8	Alat Kedokteran	41	
9	Alat Laboratorium	1.456	
10	Alat Keamanan	2	
	GEDUNG	39	
11	Bangunan Gedung	32	
12	Bangunan Monumen	7	
	JALAN DAN JARINGAN	34	
13	Jalan dan Jembatan	17	
14	Bangunan dan Irigasi	15	
15	Instalasi	1	
16	Jaringan	1	
	ASET TETAP LAINNYA	1.478	
17	Buku dan Perpustakaan	1.475	
18	Barang Seni/Budaya	0	
19	Hewan dan Tanaman	3	
	KDP	0	
20	Bangunan Gedung	0	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja dapat dilakukan dengan cara melakukan proses penyusunan rencana kerja berdasarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilakukan instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pentingnya penyusunan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Madiun bertujuan untuk memberikan arahan melalui kebijakan dan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan ini bergantung pada anggaran pendanaan yang dialokasikan sehingga dibutuhkan skala prioritas pencapaian kinerja. Sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan tabel 2.3 dibawah ini menunjukkan pencapaian kinerja yang tertuang dalam target kinerja dan bagaimana realisasi pada masing-masing tahun berjalan sehingga dapat diperoleh hasil dari tabel capaian pada masing-masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 2020 – 2023

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri / Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran (%)	%			A	-	-			BB	-			-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran (jenis)	jenis			20	-	-			20	-			100.0	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/ laporan hasil yang disusun (laporan)	laporan			31	-	-			31	-			100.0	-	-	-
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik (%)	%				-	-				-			-	-	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara (unit)	unit			1	-	-			2	-			200.0	-	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	unit			22	-	-			32	-			145.5	-	-	-

Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara (unit)	unit				35	-	-		46	-			131.4	-	-	
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun Tepat Waktu (%)	%					-	-			-			-	-	-	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dari pelaporan yang disusun (dokumen)	dokumen				16	-	-		24	-			150.0	-	-	
	Program Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor					A Skor	A Skor	A Skor		A Skor	A Skor	A Skor	-	100.0	100.0	100.0
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	%				100	100	100		100	100	100	-	100.0	100.0	100.0	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	dokumen				20	20	8		20	20	8	-	100.0	100.0	100.0	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	dokumen				-	-			-	-		-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penuhan dokumen administrasi keuangan					100	100	100		100	100	100	-	100.0	100.0	100	
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	persentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%				100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-	
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Oran/bulan				-	-	27		-	-	27		-	-	-	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai					-	-	100		-	-	100	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaihan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaihan	dokumen				-	-	3		-	-	3	-	-	-	-	100
	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase penuhan dokumen	%				100	100	100		100	100	100	-	100.0	100.0	100	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perangkat Daerah	administrasi umum																
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket				-	-	19		-	-	19	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan				-	-	12		-	-	12	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%				100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan				-	-	12				12					100
	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%				100	100	100		100	100	100	-	100.0	100.0	100	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	%				100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	%				100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-	-

Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Disediakan																
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penuhan sarana prasarana gedung kantor	%					100	100			100	100		-	100.0	100.0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit							2				2				100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	%					100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%					100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%					100	100	100		100	100	100	-	100.0	100.0	100

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan / jabatan yang layak digunakan	%					100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit					-	-	34		--	-	34		-	-	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit					-	-	15		-	-	15	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%					100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit / tahun					-	-	1		-	-	1		-	-	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Persentase Sarana Prasarana Gedung yang layak digunakan	%					100	100	-		100	100	-	-	100.0	100.0	-

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit				-	-	122		-	-	122		-	-	100	
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri / Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	skor				80.2	-	-		80.64	-	-		100.5	-	-	
	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (kg)	kg				1700	-	-		1700	-	-		100.0	-	-	
	Kegiatan Pernantauan Ketersediaan dan Kerawanan pangan	Jumlah dokumen ketersediaan dan kerawanan pangan (dokumen)	dokumen				3	-	-		3	-	-		100.0	-	-	
	Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman	Jumlah menu konsumsi olahan pangan yang tercipta (produk)	produk				20	-	-		20	-	-		100.0	-	-	
	Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Keamanan Pangan	Persentase sampel pangan segar dan olahan aman dikonsumsi (%)	%				86.2	-	-		100	-	-		116.0	-	-	
	Kegiatan Pernantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah dokumen informasi harga, pasokan dan akses pangan (dokumen)	dokumen				4	-	-		4	-	-		100.0	-	-	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat (ton)	ton					120	-	-		120	-	-		100,0	-	-	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Angka Kecukupan Energi (%)	%					100	100	97		102,9	97	97	-	-	97,0	97	
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase Ketersediaan Pangan utama (%)	%					16200	100	100		16200	106	100	-	100,0	106,0	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	dokumen					2	3	3		2	3	3	-	100,0	100,0	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Produksi Pangan Hasil Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari	kg					2000				3000			-	150,0			

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tertingginya Kerawanan Pangan	kelompok						27					27				100
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	laporan							1				1				100
	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, pasokan dan Harga pangan (dokumen)	dokumen						4	4	4			4	4	4	-	100.0
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)	kkal/kapita						2100	2100	2100			2161	2036	2046	-	102.9
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	dokumen						2	2	1			2	1	1	-	100.0
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganelekragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganelekragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	laporan						3	2	3			4	2	3	-	133.3

Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (laporan)	kali				1	1			1	1			-	100.0	100.0	
	Program Penanganan kerawanan Pangan	Prosentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan (%)	%				-				-	-			-	-	-	
	Kegiatan Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (dokumen)	dokumen				-				-	-			-	-	-	
	Penyusunan, Permutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Diperlukan (dokumen)	dokumen				-				-	-			-	-	-	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan Segar Aman yang teruji (%)	%				80	80	80		94	98.1	80	-	117.5	122.9	100	
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar ()	lokasi				8	8	8		8	8	8	-	100.0	100.0	100	
	Sub Kegiatan Penguatkan Kelembagaan Pangan Segar	Jumlah Peserta Penguatkan Kelembagaan	orang				180	200			180	226		-	100.0	113.0		

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Daerah Kabupaten Kota																	
	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen								1				1				100
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel pangan segar asal tumbuhan yang terperiksa	Sampel				45	45			120	118		-	266.7	262.2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen								1				1				100
							-	-			-	-		-	-	-	-	
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri / Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (%)	%				1.05	-	-		2.25	-		214.3	-	-	-	
	Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap (ton)	ton				320	-	-		362.9	-		113.4	-	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan dan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun				15.25	-	-		15.5	-		101.6	-	-	-	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Promosi Basir Perikanan																	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	ton				277	280	285		277	281	285	-	100.0	100.4	100	
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap (ton/tahun)	ton/tahun				378	-	-		367	-	-	-	97.1	-	-	
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan (orang)	orang				180	-	-		180	-	-	-	100.0	-	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana yang diperbaiki (unit/tahun)	Jumlah Prasarana yang diperbaiki (unit/tahun)	unit/tahun				6	-	-		6	-	-	-	100.0	-	-	
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan	RTP				245	245	250		235	245	254	-	95.9	100.0	101.6	

Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		usaha/kemudaha n akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan] [RTP]																
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	unit/tahun				2	2	-		2	2	-	-	100.0	100.0	-	-
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	paket				-	4	3		-	5	6	-	-	125.0	200	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanisuan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen penyuluhan, pembinaan dan monitoring pembudidaya ikan	dokumen				-	3			-	3		-	-	100.0		
		Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemanisuan pembudidayaan ikan di darat (orang)	orang						100					145				145
	Program Pengawasan Sumber Daya	Jumlah total produksi	ton				-	89	89		-	93	96	-	-	104.5	107.8	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Keseluruhan dan Perikanan	perikanan tangkap (ton)																
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang				-	435	435		-	435	437	-	-	100.0	100.5	
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)	dokumen				-	2	2		-	2	2	-	-	100.0	100	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun				15.6	16	16.5		16.1	16.92	17.8	-	103.2	105.8	110.6	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina (orang)	orang				50	50	50		61	72	50	-	122.0	144.0	100	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyuluhan, pembinaan dan monitoring pengolah dan pemasar ikan	dokumen				488	3			843	3		-	172.7	100.0		
		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (unit usaha)	Unit usaha							30			30				100	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Penyedian Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga (ton)	ton				-	24	26		-	30	36	-	-	125,0	138,5	
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	UMKM				-	10	12		-	22	27	-	-	220,0	225	
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri / Meningkatnya Kesejahteraan Petani / Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas pertanian	%				1.81	-	-		1.81	-	-		100,0	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas padi tanaman pangan dan hortikultura (ton/ha)	ton/ha				7,21	-	-		6,90	-	-		95,7	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah produk hasil pertanian yang dikemas dan dipasarkan (produk)	produk				1	-	-		2	-	-		200,0	-	-	
	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Pertanian	Persentase cakupan petani penerima subsidi pupuk dan AUTP (%)	%				80	-	-		80	-	-		100,0	-	-	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Target NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Penerapan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang menerapkan sistem budidaya tanaman ramah lingkungan (ha)	hektar				10	-	-		10	-	-		100.0	-	-	
	Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Days Manusia Pertanian	Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan/ pembinaan/ penyuluhan (orang)	orang				100	-	-		185	-	-		185.0	-	-	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Percentase peningkatan pendapatan pelaku usaha peternakan (%)	%				-	-			-	-	-		-	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah produksi peternakan/ daging (ton)	ton				1700	-	-		1771.84	-	-		104.2	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produk hasil peternakan yang dipasarkan (produk)	produk				20	-	-		12	-	-		60.0	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak/Hewan Peiharaan	Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlayani/ terperiksa (ekor)	ekor				3000	-	-		5041	-	-		168.0	-	-	
	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Percentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal; %)	%				94.75	-	-		95	-	-		100.3	-	-	

Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%				50	55	60		50	55	60	-	100.0	100.0	100		
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)	%				50	75	75		65	75	75	-	130.0	100.0	100		
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik	Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian (lokasi)	lokasi				39	39			39	49		-	100.0	125.6			
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik (Laporan)	laporan						1				1					100	
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Paket/laporan				1	2	1		1	2	1	-	100.0	100.0	100		

Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik (%)	%				75	75	75		100	633	75	-	133.3	844.0	100	
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	laporan				12	12	12		12	76	12	-	100.0	633.3	100	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Pengembangan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)	%				50	50	75		50	50	75	-	100.0	100.0	100	
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian (%)	%				50	-	75		50	-	75	-	100.0	-	100	
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2E (dokumen)	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2E (dokumen)	laporan				1	-	-		1	-	-	-	100.0	-	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian (laporan)	laporan				-	-	1		-	-	1	-	-	-	100	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pertanian Lainnya																	
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara (%)	%				-	25	25		-	25	25	-	-	100.0	1001	
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (unit)	unit				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	unit				-	1	1		-	1	1	-	-	100.0	100	
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	unit				-	-	1		-	-	1	-	-	-	100	
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	unit				-	-	2		-	-	2	-	-	-	100	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus	%				10	10	10		10	10	28	-	190.0	100.0	280	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Masyarakat Veteriner	Penyakit Hewan Menular (%)																
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	%				80	80	80		80	271	100	-	100.0	338.8	125	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor/				3250	2850			4218	7711		-	129.8	270.6		
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	laporan						4				4					100
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan izin paramedik veteriner) (jenis)	%/jenis(2023)				1	-	1		1	-	1	-	100	-	100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner (laporan)	dokumen				1	-	1		1	-	1	-	100.0	-	100	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi (%)	%				80	80	80		80	168	80	-	100.0	210.0	100	
	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (laporan)	laporan				-	-	10			-	35	-	-	-	350	
	Sub Kegiatan Pengawasan peredaran hewan dan produk Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	sampel				200	200			215	335		-	107.5	167.5		
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan						10				12				120	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase lahan aman bencana pertanian (%)	%				70	72	74		89.5	72	100	-	127.9	100.0	135.1	
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian (ha/th)	ha/tahun				1750	1750	1900		2417,82	1750	2426	-	-	100.0	127.7	
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	hektar				10	10			15	10		-	150.0	100.0		

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	hektar							50				57				114
	Program Perizinan usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%				-		10	12				16	16	-	-	160.0 130.8
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin usaha Pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten (Jenis)	jenis				-		2	2				1	2	-	-	50.0 100
	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah petani yang produksinya lolos uji layak mutu	orang				-		4					4		-	-	100.0
	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dokumen)	dokumen							2				2				100
	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Jumlah SDM Pertanian terlatih (%)	%					15	20	20				15	20	26	-	100.0 100.0 130
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian Terlatih (orang)	orang				135	78	200					141	78	593	-	104.4 100.0 296.5

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Target	Tergat NSPK	Target IKK/ IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dokumen penilaian kelas kelompok tani dan gapoktan	Kelompok					1	-			1	-		-	100.0	-	
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok							39					38			97.4
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	paket				-	1					1		-	-	100.0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit usaha							2				2				100
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kab/Kota	Jumlah Sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (Unit)	jens				-	1	-			1	-	-	-	100.0	-	

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2023

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

Tujuan / Sasaran	Program/ Reginatan/ Sub Kegiatas	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	SERKETARIAT		1,211,614,860	5,287,701,000	5,889,052,600	6,837,267,500	1,185,971,698	5,072,477,866	5,438,750,719	4,529,807,100	-	-	-	-	
Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri / Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Program Polyaunan Administrasi Perkantoran	Perseentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran (%)	883,751,860	-	-	-	865,812,108	-	-	-	97.97%	-	-	-	
	Kegiatan Pengedidian Jasa, Pemeliharaan dan Perlengkapan Keuara	Jumlah pengadaan jasa, pemeliharaan dan perlengkapan perkantoran (jumlah)	764,021,860	-	-	-	750,516,108	-	-	-	98.23%	-	-	-	
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keuara Daerah	Jumlah pelaku yang melakukan koordinasi dan konsultasi keuara daerah/ (jumla hasil yang diusahai laporan)	119,730,000	-	-	-	115,296,000	-	-	-	96.30%	-	-	-	
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Perseentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik (%)	191,883,000	-	-	-	186,483,880	-	-	-	97.34%	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Batin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara (jumlah)	120,000,000	-	-	-	119,680,000	-	-	-	99.71%	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Batin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (jumlah)	43,200,000	-	-	-	38,453,800	-	-	-	89.01%	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Batin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara (jumlah)	28,383,000	-	-	-	26,580,030	-	-	-	99.99%	-	-	-	
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perseentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun Tepat Waktu (%)	136,280,000	-	-	-	133,675,637	-	-	-	98.09%	-	-	-	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rpttaar Realensi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun (jumlah)	136,280,000	-	-	-	133,675,637	-	-	-	98.09%	-	-	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	5,287,701,000	5,889,052,600	6,837,267,500	-	5,072,477,866	5,438,750,719	4,529,807,100	-	95.93%	92.35%	66.25%	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)		125,500,000	143,657,600	113,649,000	-	122,310,207	141,619,150	86,329,000	-	97.46%	98.58%	75.96%
	Sub Kegiatan Pengumpulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		125,500,000	-	-		122,310,207	-	-	-	97.46%	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)		-	143,657,600	113,649,000	-	-	141,619,150	86,329,000	-	-	98.58%	75.96%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,459,330,000	4,614,012,000	5,132,457,000	-	3,299,420,765	4,180,731,170	3,378,505,384	-	99.38%	90.61%	65.63%	-
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	persentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,459,330,000	4,614,012,000	5,132,457,000	-	3,299,420,765	4,180,731,170	3,378,505,384	-	95.38%	90.61%	85.63%	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaiuan Perangkat Daerah		-	-	16,078,000	-	-	-	12,497,800	-	-	-	-	77.73%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiuan	-	-	16,078,000	-	-	-	12,497,800	-	-	-	-	77.73%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		135,343,000	200,029,000	1,185,741,600	-	133,993,500	199,984,234	787,179,705	-	99.08%	99.98%	66.39%	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	771,140,000	-	-	-	503,338,425	-	-	-	-	65.37%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	23,476,600	-	-	-	13,013,800	-	-	-	-	55.44%
	Sub Kegiatan Penyiangan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyiangan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	135,243,000	200,029,000	391,125,000	-	133,993,500	199,984,234	270,824,480	-	90.08%	99.98%	60.34%	-

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, sasaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		274,597,000	147,406,000	78,880,300	-	272,736,000	145,118,250	4,880,000	-	99.13%	98.45%	6.19%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	178,000,000	-	-		176,516,000	-	-	-	99.17%	-	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	96,367,000	147,405,000	78,880,300		96,320,000	145,118,250	4,880,000	-	99.64%	98.45%	6.19%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemesanan kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	968,061,000	612,243,000	-	-	929,911,854	608,764,723	-	-	96.06%	99.43%	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan perlakuan dan perlengkapan kantor yang representatif	968,061,000	612,243,000	-		929,911,854	608,764,723	-	-	96.06%	99.43%	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	325,000,000	171,706,000	310,461,600	-	314,105,540	162,533,192	260,818,211	-	96.65%	94.66%	83.88%	
	Sub Kegiatan Penyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perdagangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perdagangan Dinas atau Kepatuhan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55,500,000	69,424,500	88,254,600		47,837,040	63,767,802	61,319,182	-	86.19%	91.85%	60.65%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jalinnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	-	-	15,584,500		-	-	9,109,870	-	-	-	38.43%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Reabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	210,500,000	54,156,000	171,952,000		216,008,100	52,819,700	167,675,150	-	98.29%	97.54%	97.40%	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kantor dan Bangunan lainnya													
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50,000,000	48,131,500	34,670,500		49,660,400	45,945,690	23,515,000	-	99.32%	95.46%	64.94%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIDANG KETAHANAN PANGAN		718,143,250	1,499,548,000	1,164,329,000	614,145,000	713,485,783	1,413,742,189	1,140,613,595	324,998,675	99.35%	94.28%	97.97%	52.92%
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri / meningkatnya siklus pangan dan diversifikasi pangan masyarakat.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ekor Pula Pangan Harapan	718,143,250	-	-	-	713,485,783	-	-	-	99.35%	-	-	
	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (kg)	248,923,500	-	-	-	248,173,200	-	-	-	99.70%	-	-	
	Kegiatan Pemantauan Ketersediaan dan Keamanan Pangan	Jumlah dokumen ketersediaan dan keamanan pangan (dokumen)	38,697,500	-	-	-	26,648,000	-	-	-	98.79%	-	-	
	Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Sehat, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman	Jumlah meto konsumsi olahan pangan yang tercipta (produk)	129,493,250	-	-	-	127,903,707	-	-	-	98.77%	-	-	
	Kegiatan Penitiban dan Pemantauan Keamanan Pangan	Persentase sampel pangan segar dan tidak aman dikonsumsi (%)	185,977,000	-	-	-	184,908,876	-	-	-	99.43%	-	-	
	Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah dokumen informasi harga, pasokan dan ekspor impor pangan (dokumen)	68,026,600	-	-	-	67,726,000	-	-	-	99.56%	-	-	
	Kegiatan Pengawas Cadangan Celler dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat (ton)	56,726,000	-	-	-	26,126,000	-	-	-	98.94%	-	-	

Tujuan / Sasaran	Program/ Risetan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pesangket Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Angka Kecukupan Energi (%)		1,387,926,000	1,040,106,000	503,271,500	-	1,217,304,953	1,017,604,477	236,137,500	-	94.52%	97.84%	46.92%	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Ketersediaan Pangan utama (%)		309,866,000	340,145,000	351,220,500	-	287,876,047	327,836,665	138,263,800	-	92.90%	96.38%	39.37%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Nama Buah Melalui	Informasi - Harga Pangan dan Nama Buah		55,050,000	32,704,000	12,662,000		48,831,740	21,768,400	11,491,800	-	83.25%	95.97%	90.76%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersebar		172,818,003	276,089,000	308,789,500		162,618,958	264,746,965	104,722,000	-	94.10%	95.89%	33.91%	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemanfaatan Stok, pasokan dan Harga pangan (dokumen)		82,000,000	41,353,000	29,769,000		79,425,349	41,201,300	22,050,000	-	96.56%	99.55%	74.07%	
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kepala)		978,060,000	699,960,000	152,081,000	-	929,428,906	689,767,812	97,373,700	-	95.03%	98.54%	64.37%	
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penerapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)		55,050,000	26,352,000	23,553,000		47,125,332	31,037,498	20,369,900	-	85.60%	79.83%	86.49%	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Japone)		854,584,030	660,904,000	138,498,000		816,316,538	658,457,034	77,503,800	-	93,52%	99,63%	60,32%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian dan Evaluasi Konsusmi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Japone)		68,420,000	12,704,000	-		65,987,036	10,273,280	-	-	96,44%	80,87%	-
	Program Penyusunan Ketahatian Pangan	Prosentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan (%)		-	-	32,480,000	-	-	-	19,610,700	-	-	-	60,38%
	Kegiatan Penyusunan Peta Ketahatian dan Ketahanan pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Keterantaman Pangan (dokumen)		-	-	32,480,000	-	-	-	19,610,700	-	-	-	60,38%
	Penptumuan, Penizakhan dan Analisis Peta Ketahatian dan Keterantaman Pangan	Peta dan Analisis Ketahatian dan Keterantaman Pangan yang Dimulai/tuntas (dokumen)		-	-	32,480,000	-	-	-	19,610,700	-	-	-	60,38%
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan Segar Aman yang teruji (%)		211,622,000	124,124,000	78,393,500	-	196,437,236	123,009,118	69,280,476	-	92,82%	99,10%	88,34%
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Rota	Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)		211,622,000	124,124,000	78,393,500	-	196,437,236	123,009,118	69,280,476	-	92,82%	99,10%	88,34%
	Sub Kegiatan Pengawasan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (Dokumen)		128,033,000	58,573,000	23,538,500		123,503,566	67,457,118	19,140,000	-	96,46%	98,37%	81,31%

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sebagai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sub Kegiatan Penyediaan Sosial dan Pemerintahan Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (diskumen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (diskumen)		53,059,000	55,052,000	54,855,000		72,933,070	95,392,000	50,110,475	-	87,25%	100,00%	91,35%
	EIDANG PERIKANAN		511,783,300	786,345,000	721,132,600	404,508,000	496,518,752	718,456,359	699,987,239	333,973,793	97,02%	95,12%	97,07%	82,56%
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri / meningkatnya kesejahteraan masyarakat Umat Perikanan	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (%)	511,783,300	-	-	-	496,518,752	-	-	-	97,02%	-	-	-
	Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap (ton)	412,505,000	-	-	-	407,364,310	-	-	-	98,75%	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan dan Promosi Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	99,378,300	-	-	-	89,154,442	-	-	-	89,80%	-	-	-
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)		396,130,000	344,680,000	186,241,000		379,752,349	336,838,886	131,430,206	-	94,47%	97,65%	70,87%
	Kegiatan Pemberdayaan Pemudi Daya Riau Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap (ton/tahun)		243,130,000	-	-		227,017,849	-	-	-	93,37%	-	-
	Sub Kegiatan Penkerian, Penyelempangan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan (orang)		243,130,000	-	-		227,017,849	-	-	-	93,37%	-	-
	Sub Kegiatan Penyedikan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana yang diperlukan (unit/tahun)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja several Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kegiatan Pengembangan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan)/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan pengawatan kelembagaan) (RTP)		63,000,000	344,600,000	165,241,000		52,734,400	336,635,866	131,439,296	-	99.50%	97.65%	70.57%
	Sub Kegiatan Pengembangan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Dusun/Kelurahan/Kota	Jumlah Prosesor Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Dusun/Kelurahan/Kota (unit)		53,000,000	148,500,000	-		52,734,400	347,329,491	-	-	99.50%	99.31%	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Keterpaduan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Dusun/Kelurahan/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Dusun/Kelurahan/Kota (unit)		-	20,000,000	18,691,000		-	18,307,540	18,399,230	-	-	91.04%	88.84%
	Sub Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembiayaan dan pemantauan pembudidayaan Ikan di darat (tonnage)		-	176,100,000	167,550,000		-	170,798,835	113,040,066	-	-	96.94%	57.47%
	Program Pengawasan Sumber Daya Hutan dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)		-	40,360,000	34,510,000		-	37,905,320	27,740,000	-	-	93.92%	80.38%
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Weduk/Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan)/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan pengawatan kelembagaan)		-	40,360,000	34,510,000		-	37,905,320	27,740,000	-	-	93.92%	80.38%

Tujuan / Sasaran	Program/ Risetan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kewajibuan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gejengge Air Istimwa yang Dapat Ditinggal dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gejengge Air Istimwa yang Dapat Ditinggal dalam Kabupaten/Kota (dokumen)			40,360,000	34,510,000			37,905,320	27,740,000	-	-	93.92%	80.38%	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)		459,215,000	336,122,600	183,754,000		438,704,110	325,546,043	174,794,497	-	95.53%	96.85%	95.12%	
	Risetan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina (orang)		459,215,000	71,441,600	65,164,000		438,704,110	70,121,370	57,871,900	-	95.53%	98.18%	88.81%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penempatan Perikanan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap peningkatan persyarigan, peningkatan beritasah pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko unit usaha		459,215,000	71,441,600	65,164,000		438,704,110	70,121,370	57,871,900	-	95.53%	98.15%	88.81%	
	Risetan Persediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga (ton)			264,681,000	118,590,000			255,424,673	116,922,597	-	-	96.50%	98.59%	
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terbatas	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terbatas			264,681,000	118,590,000			255,424,673	116,922,597	-	-	96.50%	98.59%	
	BIDANG PERTANIAN		2,984,431,175	2,419,004,000	3,426,005,200	5,334,742,300	3,667,640,467	3,250,236,709	3,322,432,249	3,272,606,057	90.06%	93.02%	96.98%	91.35%	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja versai Tugas dan Fungsi Perangkat paerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri / Meningkatnya Kesejahteraan Petani / Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas pertanian	2,598,709,818	-	-	-	2,598,709,818	-	-	-	88.98%	-	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas pada tanaman pangan dan hortikultura (ton/ha)	997,704,790	-	-	-	786,577,034	-	-	-	78.84%	-	-	-	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Perbaikan Hasil Pertanian	Jumlah produksi hasil pertanian yang dikemas dan dipasarkan (prodok)	60,644,760	-	-	-	58,246,769	-	-	-	93.38%	-	-	-	
	Kegiatan Dukungan Pembentukan Pertamina	Perseentase csukup petani pertama subsidi pupuk dan ALTP (%)	1,235,224,385	-	-	-	1,192,913,629	-	-	-	96.57%	-	-	-	
	Kegiatan Penerapan Pertumbuhan Tanaman Bunga dan Hortikultura	Luas lahan yang memimpulkan sistem budidaya tanaman rumah lingkungan (ha)	377,147,240	-	-	-	185,662,462	-	-	-	93.52%	-	-	-	
	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Jumlah petani yang mendapatkan pengetahuan/ pembinaan/ penyuluhan (orang)	126,186,440	-	-	-	108,888,358	-	-	-	86.29%	-	-	-	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Perseentase peningkatan pendapatan polaku usaha peternakan (%)	385,721,660	-	-	-	375,352,624	-	-	-	97.31%	-	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Terpadu Optimal	Jumlah produksi peternakan/ dagang (ton)	87,568,920	-	-	-	85,980,540	-	-	-	98.19%	-	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan (prodok)	71,121,500	-	-	-	70,411,616	-	-	-	99.00%	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengawasan Penyakit Menular Ternak/ Hewan Peliharaan	Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlaysan/ terjerkitan (ekor)	136,473,100	-	-	-	131,447,298	-	-	-	97.12%	-	-	-	
	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Perseentase sempel hewan pangan osih hewan yang ASOH (Aman Sehat Irit dan Halal; %)	90,657,720	-	-	-	86,513,170	-	-	-	95.43%	-	-	-	
	Program Pomyedinan dan Pengembangan Sosial Pertanian	Efektifitas Sosial Pertanian (%)		1,608,737,600	2,310,631,000	2,269,987,000		1,503,534,985	2,272,466,874	1,612,446,095		93.46%	98.34%	79.84%	

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)		1,360,937,600	3,145,510,000	3,140,615,000		1,289,045,301	3,109,223,655	3,705,260,075	-	93.20%	98.21%	79.66%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi (Laporan)		326,588,200	146,480,000	23,556,000		186,617,060	125,480,550	17,400,000	-	87.76%	83.16%	73.89%
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		1,024,349,400	1,999,030,000	2,117,065,000		972,428,241	1,953,743,105	1,987,860,075	-	94.93%	99.34%	79.73%
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perekaman Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produksi pakan yang bermutu baik (%)		257,800,000	165,321,000	129,342,000		244,489,684	163,243,219	107,186,020	-	94.84%	95.74%	82.87%
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Saku Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Saku Kecil (Laporan)		257,800,000	165,321,000	129,342,000		244,489,684	163,243,219	107,186,020	-	94.84%	98.74%	82.87%
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Pengembangan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)		29,653,000	542,900,000	439,684,000		19,001,144	525,135,000	318,950,475	-	64.08%	96.73%	50.02%
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian (%)		29,653,000	-	14,954,000		19,001,144	-	1,490,000	-	64.08%	-	9.96%
	Sub Kegiatan Penyusunan Peti Lahan Pertanian Pangun Berkelaanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangun Berkelaanjutan/LP2B (Lokasi)		29,653,000	-	-		19,001,144	-	-	-	64.08%	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinergitas Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian (Laporan)		-	-	14,954,000		-	-	1,490,000	-	-	-	9.96%
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara (%)		-	542,900,000	434,730,000		-	525,135,000	318,950,475	-	-	96.73%	51.44%

Tujuan / Subtujuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (km)	-	543,900,000	52,815,000	-	-	525,135,000	52,229,475	-	-	96.73 %	96.89%	-
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	-	-	7,215,000	-	-	-	6,397,000	-	-	-	-	88.62%
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	-	-	364,700,000	-	-	-	159,834,926	-	-	-	-	43.83%
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	478,060,000	307,100,700	337,591,000	-	450,221,136	293,494,925	329,212,687	-	94.18%	95.57 %	67.60%	-
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pemukiman Desa/Desa Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	210,500,000	193,374,900	235,103,000	-	198,773,610	189,158,775	157,758,787	-	96.43%	97.82 %	67.10%	-
	Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (hektare)	210,500,000	193,374,900	235,103,000	-	198,773,610	189,158,775	157,758,787	-	94.43%	97.82 %	67.10%	-

Tujuan / Subtujuan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kegiatan Pengelolaan Polyanimal Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Polyanimal yang direkomendasikan (jasa medik veteriner dan jasa paramedik veteriner) (jenis)		105,850,000	-	15,000,000		99,480,347	-	-	-	93.98%	-	0.00%
	Sub Kegiatan Penyuluhan Peningaman Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner (laporan)		105,850,000	-	15,000,000		99,480,347	-	-	-	93.98%	-	0.00%
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Jumlah sampel Produk dan Hewan yang Aman dikonsumsi (%)		161,700,000	113,725,800	87,483,000		151,967,179	104,336,150	71,453,000	-	93.98%	91.74%	81.67%
	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (laporan)		-	-	16,543,000		-	-	10,600,500	-	-	-	64.09%
	Sub Kegiatan Pengawasan produksi hewan dan peternak Hewan	Jumlah Pengawasan Peternakan Hewan dan Peternak Hewan (laporan)		161,700,000	113,725,800	70,945,000		151,967,179	104,336,150	60,851,400	-	93.98%	91.74%	85.77%
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase lahan aman bencana pertanian (%)		171,200,400	146,300,000	167,855,000		157,224,185	130,879,200	69,822,960	-	91.84%	89.46%	35.64%
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Lahan lahan aman bencana pertanian (ha/tb)		171,200,400	146,300,000	167,855,000		157,224,185	130,879,200	69,822,960	-	91.84%	89.46%	35.64%
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tataman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikenalnya (Ha)	Jumlah Lahan bersifat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tataman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikenalnya (Ha)		171,200,400	146,300,000	167,855,000		157,224,185	130,879,200	59,822,960	-	91.84%	89.46%	35.64%
	Program Perlinduan usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)		-	50,000,000	33,600,000		-	27,547,280	20,031,650	-	-	75.09%	69.62%

Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja essel Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten (Jenis)		-	50,000,000	33,600,000		-	37,547,250	20,031,650	-	-	75.09 %	59.62%
	Sub Kegiatan: Pendidikan Kelautan dan Perikanan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pendidikan Kelautan dan Perikanan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dokumen)		-	50,000,000	33,600,000		-	37,547,250	20,031,650	-	-	75.09 %	59.62%
	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Jumlah SDM Pertanian terlatih (%)		131,363,000	68,873,500	2,086,055,300		120,285,259	62,909,000	931,142,190	-	91.54%	91.34 %	44.64%
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian Terlatih (orang)		131,363,000	68,873,500	2,086,055,300		120,285,259	62,909,000	931,142,190	-	91.54%	91.34 %	44.64%
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kesiagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (kelompok)	Jumlah Kesiagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (kelompok)		131,363,000	-	1,046,830,300		120,285,259	-		-	91.54%	-	0.00%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem dan Prasaranan Penyuluhan Pertanian hasil usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian hasil usaha		-	16,500,000	138,235,000		-	14,602,500	836,741,890	-	-	88.50 %	600.98%
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pengelenggaran Sekolah Lapang Kelompok Tingkat Kab/Kota	Jumlah Sekolah lapang kelompok tan yang terbentuk dan beroperasi (unit)		-	52,373,500	-		-	48,306,500	94,400,300	-	-	92.23 %	-
			5,425,972,585	9,951,598,000	11,200,419,400	13,190,659,800	8,083,616,597	9,454,913,123	10,601,783,792	8,461,388,625	93.09%	94.91%	94.66%	54.15%

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menentukan masalah pokok, masalah, dan akar masalah perlu disusun analisis pohon masalah sebagai bagian dari penentuan permasalahan yang riil dihadapi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebagaimana analisis pohon masalah dapat disimpulkan permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Penerapan konsumsi pangan secara Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman belum optimal	Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas	
		Akses pangan terhadap masyarakat belum optimal	
		Belum optimalnya pengelolaan (produksi, uji produk, peningkatan pengetahuan masyarakat, sertifikasi, izin edar) keamanan pangan.	
		Belum efektifnya sosialisasi dan informasi penerapan Konsumsi pangan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA)	
2	Pendapatan pelaku usaha perikanan belum optimal	Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kota Madiun	
		Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan	
		Keuntungan pembudidaya ikan rendah	
		Produksi Perikanan Budidaya belum Optimal	
		Sumberdaya ikan di perairan umum darat semakin berkurang	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
		Angka Konsumsi Ikan belum Optimal	
		Belum aktifnya sosialisasi dan informasi peningkatan konsumsi ikan	
		Sarana yang dimiliki pemasar ikan belum optimal	
		Pertambahan populasi ternak belum optimal	
		Tingginya Biaya Produksi Pertanian	
		Nilai jual produk pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura belum kompetitif	
		Ketersediaan prasarana pertanian yang belum optimal	
		Faktor Penyebab Gagal Panen Beragam	
3	Pendapatan Petani dan Pelaku Usaha Peternakan Belum Optimal	Diseminasi informasi dan teknologi pertanian yang belum optimal	
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Belum Optimal	
		Nilai tambah produk bahan pangan asal hewan yang masih belum maksimal	
		Nilai tambah produk olahan asal hewan yang masih belum maksimal	
		Diseminasi informasi dan teknologi peternakan yang belum optimal	
		Rumah Potong Hewan (RPH) yang belum memenuhi standar teknis	
		Mitigasi Faktor Penyebab Gagal Panen Belum Optimal	

Sebagaimana tabel di atas maka terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu :

1. Penerapan konsumsi pangan secara Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA) belum optimal sehingga perlu ditingkatkan

Permasalahannya yaitu : Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas, Akses pangan terhadap masyarakat belum optimal, dan belum optimalnya pengelolaan (produksi, uji produk, peningkatan pengetahuan masyarakat, sertifikasi, izin edar) keamanan pangan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu : Keamanan dan ketersediaan pangan adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan Ketahanan Pangan. Memenuhi kondisi kota dengan ketahanan pangan yang baik dengan tidak hanya mencukupi dalam hal jumlahnya, namun keberagaman, keseimbangan gizinya serta keamanan pangan tersebut. Permasalahan keamanan pangan ini antara lain karena masih terdapat bahan pangan segar beredar yang dinyatakan tidak aman dan adanya sampel makanan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan.

2. Pendapatan pelaku usaha perikanan belum optimal sehingga perlu ditingkatkan

Pelaku usaha perikanan budidaya dan tangkap masih memiliki permasalahan yaitu : masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kota Madiun, Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan, keuntungan pembudidaya ikan rendah, produksi perikanan budidaya belum optimal, sumberdaya ikan di perairan umum darat semakin berkurang, Tingkat Konsumsi Ikan belum Optimal, Belum aktifnya sosialisasi dan informasi peningkatan konsumsi ikan, Sarana yang dimiliki pemasar ikan belum optimal. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mebudidayakan ikan yang baik dan benar

3. Pendapatan Petani dan Pelaku Usaha Peternakan Belum Optimal

Seperti halnya pelaku usaha perikanan budidaya dan tangkap, pelaku usaha pertanian dan peternakan juga memiliki permasalahan pokok berupa produktivitas yang masih rendah. Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan pokok tersebut, yang pertama adalah belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (urban farming) dan peternakan sebagai peningkatan ketahanan pangan.

Penyebab berikutnya adalah masih kurang optimalnya penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian (urban farming) dan peternakan. Sedangkan faktor penyebab lain yang tidak bisa dikendalikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun adalah menurunnya daya dukung lingkungan karena tata guna lahan yang mengutamakan pembangunan infrastruktur dan tempat tinggal.

3.2. Isu Strategis

Adapun hasil identifikasi isu-isu strategis, dan hasil penentuan isu strategis dengan metode USG (*Urgency, Seriousness dan Growth*), maka isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Yang akan ditangani dalam renstra peralihan selama 2 tahun dan prioritas penanganannya pada tahun rencana adalah :

- Penerapan konsumsi pangan secara Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman belum optimal
- Pendapatan pelaku usaha perikanan belum optimal
- Pendapatan Petani dan Pelaku Usaha Peternakan Belum Optimal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Rentra Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026

Dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi diperlukan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya pada Dinas Ketahanan dan Pertanian dapat terarah. Keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD/RPD Kota Madiun. Tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-	
				1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri		Indeks Ketahanan Pangan	81,04	81,05
		Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,8	95,9
		Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,35	1,36
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,16	1,17
		Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,22	1,23
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Perangkat Daerah	81,05	81,05

Tabel 4. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung Sasaran RPD

No.	Sasaran RPD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat
			Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani
			Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Tabel 4. 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah

No.	Norma, Strandar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat
			Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani
			Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah

4.2 Cascading Indikator Kinerja Perangkat Daerah



Gambar 4. 1 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diperlukan strategi serta arah kebijakan dalam pencapaiannya dalam kurun waktu periodeisasi Renstra. Rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5. 1 Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan misi 1 kesejahteraan

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Meningkatkan penerapan konsumsi pangan secara B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	Peningkatan penerapan konsumsi pangan secara B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan pangan non beras non terigu
			Peningkatan skor pola pangan harapan
			Peningkatan akses dan Ketersediaan pangan
			Peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
			Pencegahan boros pangan
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatkan inovasi sistem perikanan (teknologi produksi, pengolahan, dan pemasaran) belum optimal	Pembinaan kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan
			Peningkatan peran masyarakat dalam konsumsi ikan
			Peningkatan peran masyarakat dalam produksi benih ikan
			Sosialisasi peraturan perundangan terkait perikanan
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan umum
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Inovasi sistem pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan (teknologi produksi, pengolahan, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian dan pemasaran)	Peningkatan pembinaan SDM Pertanian
			Peningkatan peran masyarakat dalam inovasi pertanian urban terintegrasi yang ramah lingkungan
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, Perkebunan dan hortikultura baik skala

VISI	: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera		
MISI 1	: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pekarangan atau skala usaha
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan produk hasil pertanian dan peternakan
			Peningkatan peran masyarakat dalam ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
			Fasilitasi dan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian kepada masyarakat pertanian
			Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan limbah pertanian dan peternakan
			Berkontribusi dalam pengendalian angka stunting
			Pembiayaan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
			Pengendalian dan penanggulangan penularan penyakit hewan zoonosis
			Sosialisasi peraturan perundungan terkait pertanian, peternakan dan kesehatan hewan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran, maka perangkat daerah memerlukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan menjadi acuan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja dalam periodenisasi Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Duta Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi	
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)	
URUSAN PANGAN																	
Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri	Meningkatnya Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	2	9	3			PROGRAM PEHINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi / AEP	2046 kcal/ka pita	2000 kcal/ka pita	395,923,000	2000 kcal/ka pita	395,923,000	2000 kcal/ka pita	791,846,000	
			2	9	3	2.01		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersedian pangan utama	100%	100%	223,425,000	100%	223,425,000	100%	446,850,000	
			2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 laporan	1 laporan	172,840,000	1 laporan	172,840,000	1 laporan	345,680,000	
			2	09	03	2.01	0014	Sub Kegiatan Koordinasi dan Synchronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	5 dokumen	6 dokumen	50,585,000	6 dokumen	50,585,000	6 dokumen	101,170,000	
			2	9	3	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein / AEP	63 gram/ka pita	63 gram/ka pita	172,498,000	63 gram/ka pita	172,498,000	63 gram/ka pita	344,996,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan output, Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 09 03 2.04	0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	1 dokumen	44,000,000	1 dokumen	44,000,000	1 dokumen	88,000,000			
			2 09 03 2.04	0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengazelaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengazelaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 laporan	1 laporan	128,498,000	1 laporan	128,498,000	1 laporan	256,996,000			
			2 9 4		PROGRAM PENANGANAN KERAWARAN PANGAN	Persentase daerah sehat dan raya pangan	25%	22%	54,300,000	22%	54,300,000	22%	108,600,000			
			2 9 4 2.01		Kegiatan Penyusunan Peta Keterianan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Kerepatan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	54,300,000	1 dokumen	54,300,000	1 dokumen	108,600,000			
			2 09 04 2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Keterianan dan Kerepatan Pangan	Peta dan Analisa Ketahanan dan Kerepatan Pangan yang Dimutakhirkann	1 dokumen	1 dokumen	54,300,000	1 dokumen	54,300,000	1 dokumen	108,600,000			
			2 9 5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang teruji	80%	80%	87,263,000	80%	87,263,000	80%	174,526,000			
			2 9 5 2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Diolah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	8 lokasi	8 lokasi	87,263,000	8 lokasi	87,263,000	8 lokasi	87,263,000			
			2 09 05 2.01	0009	Sub Kegiatan Pengawasan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pengawasan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan	1 dokumen	1 dokumen	87,263,000	1 dokumen	87,263,000	1 dokumen	174,526,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi
									Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							negar asal tumbuhan									

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKARAN

Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	3	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 ton	290 ton	412,000,000	290 ton	370,500,000		782,500,000			
			3	25	4	2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan koalibaguan) (RTP)	254 RTP	260 RTP	412,000,000	261 RTP	370,500,000	260 RTP	782,500,000			
			3	25	04	2.04	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 unit	205,000,000	1 unit	158,000,000	1 unit	363,000,000		
			3	25	04	2.04	0003	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 unit	4 unit	150,000,000	4 unit	155,000,000	4 unit	305,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi			
										Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3	25	04	2.04	0005	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Daur	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Daur	145 orang	125 orang	57,000,000	130 orang	57,500,000	130 orang	114,500,000				
			3	25	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	96 ton	89 ton	70,000,000	89 ton	70,500,000	89 ton	140,500,000					
			3	25	5	2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemandirian akses iptek dan informasi/dan penguan kelembagaan)	437 orang	435 orang	70,000,000	436 orang	70,500,000	435 orang	140,500,000					
			3	25	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	70,500,000	2 dokumen	140,500,000				

Tujuan	Batasan	Indikator Basaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi				
										Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			3	25	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan	17,8 kg/kapita/tahun	33,57 kg/kap/tahun	333,754,000	33,57 kg/kap/tahun	334,695,000	33,57 kg/kap/tahun	668,449,000						
			3	25	06	3.04	Kegiatan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 orang	50 orang	65,164,000	50 orang	66,150,000	50 orang	131,314,000						
			3	25	06	3.04	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dari skala usaha kecil	30 unit usaha	30 unit usaha	65,164,000	40 unit usaha	66,150,000	30 unit usaha	131,314,000					
			3	25	06	3.06	Kegiatan Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	-	2 Jenis	268,590,000	2 Jenis	268,545,000	2 Jenis	537,135,000						
			3	25	06	3.06	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	-	1,5 kg/kap/tahun	268,590,000	1,5 kg/kap/tahun	268,545,000	1,5 kg/kap/tahun	537,135,000					

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi	
										Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			target							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Terwujudnya Ketahanan dan Pangan yang Mandiri	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan Biaya Produksi	Ratio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	3	27	2		PROGRAM PERVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	60%	65%	2,396,000,000	65%	2,396,000,000	65%	4,792,000,000			
			3	27	2	2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani	75%	80%	2,271,000,000	80%	2,271,000,000	80%	4,542,000,000			
			3	27	2	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1 laporan	1 laporan	150,900,000	1 laporan	150,900,000	1 laporan	301,800,000		
			3	27	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pendaftaran Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan	2,120,100,000	1 laporan	2,120,100,000	1 laporan	4,240,200,000		
			3	27	2	2.03	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75%	75%	125,000,000	75%	125,000,000	75%	250,000,000			
			3	27	02	2.03	0001	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 laporan	12 laporan	125,000,000	12 laporan	125,000,000	12 laporan	250,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi	
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75%	100%	2,712,815,000	100%	2,592,138,852	100%	5,304,953,852		
			3	27	3	2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	75%	100%	230,000,000	100%	125,000,000	100%	355,000,000		
			3	27	3	2.01	0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1 dokumen	1 dokumen	113,627,000	1 dokumen	8,627,000	1 dokumen	122,254,000		
			3	27	03	2.01	0016 Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B	-	1 dokumen	116,373,000	1 dokumen	116,373,000	1 dokumen	232,746,000		
			3	27	3	2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara	25%	25%	2,482,815,000	25%	2,467,138,852	25%	4,949,953,852		
			3	27	03	2.02	0003 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1 unit	52,815,000	1 unit	2,017,138,852	1 unit	2,069,953,852		
			3	27	03	2.02	0009 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	1 unit	385,000,000	1 unit	35,000,000	1 unit	420,000,000		
			3	27	03	2.02	0010 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 unit	2 unit	270,000,000	2 unit	270,000,000	2 unit	540,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan output, Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi		
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			3	27	03	2.02	0015	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	1 unit	1,775,000,000	1 unit	145,000,000	1 unit	1,920,000,000		
Meningkatnya Kenyamanan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	28%	10%	337,603,000	10%	337,603,000	10%	675,206,000			
			3	27	4	2.01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukuan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan	100%	80%	250,103,000	80%	250,103,000	80%	500,206,000		
			3	27	04	2.01	0008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengadami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 laporan	4 laporan	250,103,000	4 laporan	250,103,000	4 laporan	500,206,000		
			3	27	4	2.04		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah sampel Produk anal Hewan yang Aman dikonsumsi	80%	80%	87,500,000	80%	87,500,000	80%	175,000,000		
			3	27	04	2.04	0002	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 laporan	12 laporan	87,500,000	12 laporan	87,500,000	12 laporan	175,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi	
										Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			target	Rp	target	Rp				target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEWANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan aman bencana pertanian	100%	70%	150,000,000	70%	150,000,000	70%	300,000,000			
			3	27	5	2.01	Kegiatan Pengendalian dan Pewanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	2426 ha/tahun	2000 ha/tahun	150,000,000	2000 ha/tahun	150,000,000	2000 ha/tahun	300,000,000			
			3	27	05	2.01	0301	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	57 ha	50 ha	150,000,000	50 ha	150,000,000	50 ha	300,000,000		
			3	27	6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	36%	15%	33,600,000	15%	33,600,000	15%	67,200,000			
			3	27	6	2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang diterbitkan oleh instansi kompeten	2 jenis	2 jenis	33,600,000	2 jenis	33,600,000	2 jenis	67,200,000			
			3	27	06	2.01	0302	Sub Kegiatan Penilaian Kelayuan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayuan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 dokumen	2 dokumen	33,600,000	2 dokumen	33,600,000	2 dokumen	67,200,000		
			3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah SDM pertanian terlatih	26 %	20%	1,946,820,500	20%	2,379,479,487	20%	4,326,299,987			
			3	27	7	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian Terlatih	593 orang	200 orang	1,946,820,500	200 orang	2,379,479,487	200 orang	4,326,299,987			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi	
									Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			3	27	07	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 kelompok/unit	1,946,820,500	38 kelompok/unit	2,379,479,487	38 kelompok/unit	4,326,299,987		
URUSAN PEMERINTAHAN RUTIN																	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Bilai Evaluasi Akuntab Sitas Kinerja Perangkat Daerah	2 9 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A	A	7,365,109,608	A	7,211,842,430	A	14,576,952,038					
		2 9 1 2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah (%)	100%	100%	62,000,000	100%	75,100,000	100%	137,100,000					
		2 9 1 2.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Diklasar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan diklasar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	6 dokumen	62,000,000	6 dokumen	75,100,000	6 dokumen	137,100,000					
		2 9 1 2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi keuangan (%)	100%	100%	5,382,457,000	100%	5,382,457,000	100%	10,764,914,000					
		2 9 1 2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang / bulan	24 orang / bulan	5,382,457,000	24 orang / bulan	5,382,457,000	24 orang / bulan	10,764,914,000					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi	
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2	9	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	100%	47,078,000	100%	51,078,000	100%	98,156,000	
			2	9	1	2.05	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepergawainan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepergawainan (dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	47,078,000	3 dokumen	51,078,000	3 dokumen	98,156,000	
			2	9	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	100%	1,263,616,600	100%	1,212,347,430	100%	2,475,964,030	
			2	9	1	2.06	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 paket	12 paket	893,416,600	12 paket	834,347,430	12 paket	1,737,964,030	
			2	9	1	2.06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	360,000,000	12 Laporan	378,000,000	12 Laporan	738,000,000	
			2	9	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	100%	123,800,000	100%	82,740,000	100%	206,540,000	
			2	9	1	2.07	2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1 unit	45,000,000	0 unit	0	0 unit	45,000,000	
			2	9	1	2.07	9	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 unit	2 unit	78,800,000	2 unit	82,740,000	2 unit	161,540,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja	Lokasi	
										Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			target	Rp	target	Rp				target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
							Lainnya yang Disediakan											
			2	9	1	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	100%	486,158,008	100%	408,120,000	100%	894,278,008			
			2	9	1	2.09	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	35 unit	130,255,000	35 unit	130,255,000	35 unit	260,510,000		
			2	9	1	2.09	6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperluars/direhababilitasi	122 unit	80 unit	61,500,000	80 unit	57,865,000	80 unit	109,165,000		
			2	9	1	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperluars/direhababilitasi	1 unit	2 unit	304,603,008	2 unit	220,000,000	2 unit	524,603,008		
											16,295,188,108			16,413,844,769		32,709,032,877		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Menjalankan program, kegiatan serta sub kegiatan Perangkat Daerah guna melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyelenggaranya menetapkan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Pada Tahun			Keterangan
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,04	81,04	81,05	Tujuan PD
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,8	95,8	95,9	Sasaran PD
3	Rasio pendapatan pelaku usaha Perikanan dengan biaya produksi	Persen (%)	1,35	1,35	1,36	Sasaran PD
4	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Persen (%)	1,16	1,16	1,17	Sasaran PD
5	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	Persen (%)	1,221	1,22	1,23	Sasaran PD
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,48	4,48	4,48	Sasaran PD

Selain Indikator Kinerja Utama, perangkat daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan bidang urusan yang diampu, tolok ukur kinerja bidang urusan yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
a.	Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib					
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar					
III	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
	Persentase Angka Kecukupan Protein	%	100	100	100	Indikator Sasaran Kota
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,04	81,05	81,05	Tujuan sesuai BA Forum PD Renstra
2	Skor Pola Pangan Harapan	skor	95,8	95,9	95,9	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
3	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	95%	95%	95%	Indikator Sasaran Kota
5	Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita	2000	2000	2000	program sesuai BA Forum PD Renstra
6	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	80%	80%	80%	program sesuai BA Forum PD Renstra
7	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	22%	22%	22%	program sesuai BA Forum PD Renstra
8	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100%	100%	100%	Lppd
9	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
10	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
11	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
12	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak	ada	ada	ada	Lppd
13	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	1	2	2	Lppd
14	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak	ada	ada	ada	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
	15 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	16 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ tidak	ada	ada	ada	Lppd
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
A	Kemampuan Ekonomi					
III	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
	1 Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,35	1,36	1,36	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	2 Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	290 ton	290 ton	290 ton	program sesuai BA Forum PD Renstra
	3 Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/ta hun	33,57 kg/kapita /tahun	33,57 kg/kapita/t ahun	33,57 kg/kapita /tahun	program sesuai BA Forum PD Renstra
	4 Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	89 ton	89 ton	89 ton	program sesuai BA Forum PD Renstra
	5 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	381	381	381	Lppd
	6 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	435 RTP	436 RTP	436 RTP	Lppd
	7 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	8 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	9 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	260	260	260	Lppd
	10 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	517.400 ekor	517.400 ekor	517.400 ekor	Lppd
V	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
	2 Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,22	1,23	1,23	Indikator Sasaran PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
	3 Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	ratio	1,16	1,17	1,17	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	4 Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	65%	65%	65%	program sesuai BA Forum PD Renstra
	5 persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	100%	100%	100%	program sesuai BA Forum PD Renstra
	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	10%	10%	10%	program sesuai BA Forum PD Renstra
	8 persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	76%	76%	76%	program sesuai BA Forum PD Renstra
	9 persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	15%	15%	15%	program sesuai BA Forum PD Renstra
	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	20%	20%	20%	program sesuai BA Forum PD Renstra
11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6	6	6	Lppd
12	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	2	2	2	Lppd
13	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	Lppd
14	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	2	2	2	Lppd
15	Persentase prasarana yang digunakan	%	75%	75%	75%	Lppd
16	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	50%	50%	50%	Lppd
17	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	50%	50%	50%	Lppd

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renstra Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

Madiun, Januari 2024

